

## **RELASI POLITIK ELITE LOKAL PESISIR DAN PETANI RUMPUT LAUT PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 KOTA PALOPO**

**Ali Armunanto**

*Dosen Program Studi Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin  
Email: a.armunanto14@gmail.com*

**Hidayat Awaluddin**

*Peneliti Pada SERUM Institute*

### **Abstract**

*This research aims to find out how the local elites of coastal area establishing political relation with the mass, especially with seaweed farmers and to determine the factors that influence. This research was conducted in Palopo city, South Sulawesi since November until December 2015 and used descriptive qualitative method. The primary data was obtained by interviewing some informants in Wara Utara district in Palopo as the first election's district. To support the primary data, the researcher used secondary data that obtained from literature resources, documents, and articles related to this research.*

*The result of this research shows that the political relation existed in the form of economical dependence, which was the exchange, including the products marketing and occupation field that was dominated by the local elites. The local elites gained benefits in terms of support in the legislative election 2014, so that they got position in DPRD (District Legislative Council) of Palopo city. The political relation was affected by calculation benefit of elites, dependence service of markets, and guaranteed income by local elites in coastal area.*

**Keywords :** *Local Elite, Masses, Election, Political Relation.*

### **Latar Belakang**

Indonesia telah mengalami perubahan yang besar pada sistem politiknya sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 1999. Dengan demokrasi dibuka seluas-luasnya dan partisipasi politik dalam pembangunan meningkat hingga ke daerah, sehingga pengelolaan pesisir dan sumberdaya alam lainnya pun ikut bergantidari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengesahan UU No 22 tahun 1999 yang mengatur dan mengakomodir segala macam kewenangan daerah dalam

mengelola pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk Provinsi dan 4 mil untuk Kabupaten/kota.<sup>1</sup>

Masyarakat pesisir secara sosio-kultural berada pada kelompok dengan akar budaya yang dibangun atas paduan antara budaya maritim laut, pantai dan orientasi pasar. Tradisi ini berkembang menjadi budaya dan sikap hidup yang kosmopolitan, inklusifistik, egaliter, *outward looking*, dinamis, *enterpreneurship* dan pluralistik. Sifat dari pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam wilayah pesisir itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu: (1) tanpa pemilik (*open access property*); (2) milik masyarakat atau komunal (*common property*); (3) milik pemerintah (*public state property*); (4) milik pribadi (*private property*).<sup>2</sup>

Masyarakat pesisir kota Palopo dengan kegiatan produksi di bidang agrikultur kelautannya seperti pembudidayaan rumput laut mampu menaikkan nilai ekspor komoditi lokalnya dan menambah pendapatan daerah dari sektor perikanan dan kelautan. Sebagai contoh, rumput laut jenis *Gracilarria sp* misalnya, banyak dikembangkan oleh petani rumput laut kota Palopo dan mengalami peningkatan jumlah produksi yakni 241,151 ton pada tahun 2013 dengan total nilai produksi 482,300 Miliard dan luas areal 996 Ha, jika dibandingkan tahun 2012 dengan produksi hanya 24,799 ton, sehingga menurut kalkulasi ekonomi pertambahan nilai produksi bergerak naik sebesar 216,352 ton pada tahun 2013.<sup>3</sup>

Akumulasi angka ekonomi tersebut tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun dalam kehidupan sosial politik petani rumput laut sering kali masih juga berada pada kondisi yang kurang menguntungkan. Petani rumput laut pada spektrum lokalitas dan elite yang terjadi di kota Palopo yang bermukim di wilayah pesisir ini yang juga sebagai produsen utama dari mata rantai ekonomi komoditi memiliki posisi yang rentan sehingga kerap kali menjadi target mobilisasi politik. Hal ini karena masyarakat pesisir ini merupakan lumbung suara potensial pada tiap kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan

---

<sup>1</sup> [bappenas.go.id](http://bappenas.go.id)

<sup>2</sup> Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, (Yogyakarta: LKIS, 2009), h. 89.

<sup>3</sup> Kota Palopo dalam Angka 2014.

kepala daerah di Kota Palopo, selain itu masyarakat pesisir ini juga memiliki karakteristik yang responsif, massif dan militan.

Data jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir kota Palopo menunjukkan jumlah yang tidak sedikit. Sebagian besar wilayahnya yakni lima dari sembilan kecamatan memiliki wilayah pesisir di antaranya adalah Kecamatan Telluwanua, Bara, Wara Utara, Wara Timur dan Wara Selatan. Presentase topografi atau ketinggian wilayahnya yakni 62,00 % adalah dataran rendah 0-500 mdpl. Dengan melihat data tersebut, masyarakat pesisir cenderung mempengaruhi secara signifikan kemenangan seorang kandidat dalam tiap kontestasi politik.

Pemilihan legislatif 2014 memberikan akses elite politik untuk mengklaim keberhasilan atau memberi janji program, dan bantuan logistik lainnya. Intensitas klaim politik ini lazimnya terjadi pada masyarakat pesisir terutama petani rumput laut di daerah pemilihan 1 Kota Palopo, yakni Kecamatan Bara, Wara Utara, dan Telluwanua. Sedikitnyaterdapat 10 calon legislator *incumbent* yang bersaing secara ketat untuk memperebutkan 9 kursi di DPRD Kota di Daerah Pemilihan 1, dengan kondisi seperti itu ruang politik dan kekuasaan yang terjadi semakin besar dan kompleks.

Membicarakan masalah dalam konteks masyarakat pesisir tidak bisa lepas dari konteks masalah kemiskinan. Masyarakat pesisir ketika dihadapkan oleh sebuah ruang politik yang menggoda, fenomena mobilisasi politik menjadi hal lumrah yang kemudian menjadi pemicu banyaknya aktifitas politik. Kondisi seperti itu memberikan pengaruh buruk terhadap struktur masyarakat pesisir pembangunan demokrasi.

Masyarakat yang berada kawasan pesisir menghadapi persoalan yang kompleks dalam pembangunan politik. Berbagai persoalan menjadi begitu kompleks di wilayah pesisir salah satunya adalah persoalan kemiskinan. Menurut Febrianto dan Rahardjo (2005), masyarakat pesisir ini sebagian besar menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar. Tanah/lahan luas dan selain itu juga, mereka harus melawan kondisi musim atau cuaca yang berubah dan terkadang kurang menguntungkan. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan kecil, petani

tambak/rumput laut, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil. Hal itulah kemudian menjadikan kemampuan mereka untuk investasi sangat terbatas.

Data menunjukkan pada tahun 2013, jumlah fakir miskin yang berada di wilayah pesisir kota Palopo sebanyak 2302 jiwa dan kondisi rumah dan lingkungan tidak layak sebesar 1054<sup>4</sup>. Selain itu jumlah rumahtangga yang berprofesi sebagai rumah tangga pembudidaya komoditi perikanan di kota Palopo tidaklah sedikit, catatan dalam angka sebanyak 1.831<sup>5</sup> rumah tangga pesisir yang tersebar di 5 kecamatan di luar profesi nelayan yang rata-rata memiliki anggota keluarga sebanyak 5 orang.

Dalam kondisi yang terpuruk karena kemiskinan, pada pemilihan umum masyarakat pesisir harus berhadapan dengan dilema ketika diperhadapkan pada ruang kepentingan elite dan kekuasaan. Berbagai masalah penting dan mendasar yang menjadi kepentingan masyarakat pesisir harusnya dituntaskan, namun yang terjadi hanya dijadikan komoditi politik pada saat pemilu. Kecenderungan ini menjadikan petani rumput laut sebagai bagian dari masyarakat pesisir terpinggirkan perlahan-lahan untuk membela kepentingannya yang kemudian berubah bias dalam ruang politik.

Petani rumput laut sebagai salah satu bagian dari masyarakat pesisir juga juga menghadapipersoalan ekonomi yang sama yaitu keterikatannya pada kesepakatan kelembagaan ekonomi formal dan informal. Kesepakatan tersebut berupa harga pemasaran, biaya produksi, pertambahan nilai komoditi dan penentuan kualitas hasil panen. Kesepakatan tersebut dilakukan petani kepada para pemilik modal, pengepul dan lembaga ekonomi seperti koperasi yang tertaut pada ketetapan harga sepihak yang lebih menguntungkan pemilik modal, pihak yang menyusun kerangkaperdagangan seperti kebijakan pemerintah yang menetapkan harga jual minimum, dan pemilik lahan.

Petani rumput laut sebagai bagian masyarakat pesisir masih tetap saja berada pada persoalan yang mendasar seperti mekanisme pasar yang tidak setara (*asimetris*) dari pemodal dan pemilik lahan, akses permodalan yang terbatas,

---

<sup>4</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan dikutip pada Palopo dalam Angka 2014, h. 153.

<sup>5</sup>Dinas Perikanan dan Kelautan dikutip pada Palopo dalam Angka 2014, h. 224.

penyuluhan yang tak memadai, terget produksi/panen berkualitas yang harus berhadapan dengan stok pupuk yang tidak jarang kurang atau kesepakatan kelembagaan oleh pihak koperasi misalnya, yang dalam hal ini masih kurang mendapat porsi kebijakan yang memihak kepada nasib mereka. Kemudian ditambah lagi ketika mereka bersinggungan pada praktek perebutan kekuasaan di ruang politik skala lokal yang mobilitatif sehingga proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah cenderung hanya menempatkan masyarakat pesisir sebagai masyarakat kelas dua.<sup>6</sup>

Masyarakat pesisir kota Paloposecarajumlah dari pemegang sura (*voters*) adalah yang paling besar dan penulis melihat fenomena politik ini di Kecamatan Wara Utara pada pemilihan legislatif 2014. Pada pemilu legislatif 2014 terdapat 10 calon *incumbent* untuk memperebutkan 9 kursi pada dapil 1 yakni Kecamatan Bara, Tellu Wanua dan Wara Utara yang dalam hal ini sebagian besar wilayahnya adalah pesisir dengan tingkat kepadatan penduduk di mencapai 1.072 per km<sup>2</sup> pada tahun 2013 dengan luas wilayah 23,35 km<sup>2</sup>.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang telah dikerucutkan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk hubungan antara elitelokal pesisir dan petani rumput laut menjadi relasi politik pada pemilihan legislatif DPRD kota Palopo 2014 ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut menjadi relasi politik ?

### **Petani Rumput Laut Dalam Perspektif Ekonomi Politik**

Deere & Janvry<sup>8</sup> mengemukakan sedikitnya ada tujuh mekanisme yang membuat masyarakat petani terjerembab dalam ruang kekuasaan elite yang mobilitatif dan eksploitatif dalam perspektif ekonomi politik sebagai berikut. (i)

---

<sup>6</sup>Terkait persoalan kondisi sosial masyarakat pesisir dengan pendekatan kritis bisa kita lihat dituliskan Arif Satria "*Ekologi Politik Nelayan*" terbitan LKiS.2009.

<sup>7</sup>Kota Palopo dalam Angka 2014.

<sup>8</sup>Lihat, Ahmad Erani Yustika "*Ekonomi Politik; Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*", (Pustaka Pelajar Cetakan III, 2014), h. 253.

*rent in labour services*, hal ini menggambarkan adanya kesulitan petani untuk mendapatkan akses kepemilikan lahan, sehingga mereka menyediakan diri bekerja sebagai buruh tani; (ii) *rent in kind*, misalnya sewa bagi hasil yang dalam praktiknya menunjukkan kedaulatan tuan tanah dalam memberikan porsi bagi hasilnya; (iii) *rent in cash*, petani harus menyewa secara cash untuk mendapatkan akses mengolah lahan; (iv) *appropriation of surplus value via the wage*, yakni terdapat pengambilan surplus atau nilai lebih atas produksi dengan jalan pemberian upah standar, (v) *appropriation via prices*, petani rugi akibat harga jual (*output*) yang anjlok di pasaran atau harga belanja (*input*) yang membumbung, atau akibat keduanya sekaligus; (vi) *appropriation via usury*, pendapatan petani direnggut akibat tingkat suku bunga pinjaman yang lebih besar ketimbang harga pasar nasional maupun internasional; (vii) *peasant taxation*, negara sering memajaki secara tidak langsung produk petani. Pajak ekspor untuk komoditi petani merupakan mekanisme umum terhadap terjadinya alih pendapatan dari petani ke negara.

Francis Fukuyama dalam tata sosial baru,<sup>9</sup> menjelaskan bahwa di masyarakat ada kenyataan yang mengindikasikan sebagai masyarakat dengan laju modernitas yang tinggi dengan kekuatan kapital dan akses politik yang paling menentukan (*determinan factor*) berimplikasi kepada banyaknya bemunculan fenomena yang seperti diatas, salah satu kesan bahwa kekuatan kapital cenderung memenangkan kompetisi atau perebutan porsi kekuasaan dibanding dengan idealisme nilai-nilai dan moralitas dalam politik yang dibangun melalui investasi sosial yang bertahap. Meskipun di beberapa kasus pemilihan ada pula yang berhasil memasukkan batin demokrasi sebagai pijakan untuk memilih meskipun sangat jarang ditemukan.

Dalam literatur ilmu sosial, hubungan ekonomi politik antara petani dan pemilik modal seringkali dibingkai dalam konsep *patron-client*. Konsep ini merupakan konsep hubungan strata sosial dan penguasaan sumber ekonomi. Konsep patron selalu diikuti oleh konsep klien, tanpa konsep klien konsep patron tentu saja tidak ada. Karenanya, keduanya istilah tersebut membentuk suatu

---

<sup>9</sup>Francis Fukuyama “*Guncangan Besar*”, Gramedia Pustaka Utama, 2005, Bab 6.

hubungan khusus yang disebut dengan istilah *clientelism*, konsep *clientelism* dipandang sebagai sebuah proses evolusioner yang menimbulkan kesadaran akan adanya ikatan kekeluargaan yang kuat yang mampu memberikan keamanan fisik, ekonomi, dan emosional.<sup>10</sup> Istilah ini merujuk pada sebuah bentuk pengaturan nilai sosial yang dicirikan oleh hubungan patron-klien, di mana patron yang berkuasa dan kaya memberikan pekerjaan, perlindungan, infrastruktur, dan berbagai manfaat lainnya kepada klien yang tidak berdaya dan miskin.<sup>11</sup> Imbalannya, klien memberikan berbagai bentuk kesetiaan, pelayanan, dan bahkan dukungan politik kepada patron. Selain itu, konsep itu juga memunculkan kesadaran akan ketidaksamaan akses pada barang dan sumber. Hubungan khusus di sini dicirikan oleh suatu hubungan yang lebih bersifat personal dan vertikal, yakni hubungan pribadi yang bersifat superior-inferior.<sup>12</sup>

Patron merupakan kelas yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi, sehingga ia dapat melakukan “eksploitasi” terhadap klien yang banyak menggunakan alat produksi yang dimiliki patron. Masih dalam konsepsi Marxian, patron akan mengeluarkan modalnya untuk dua hal, yaitu membeli alat-alat produksi dan sebagian lagi untuk membeli tenaga kerja (klien). Klien berada pada posisi inferior dalam hubungan ekonomi kecuali menjual tenaga kerja mereka.<sup>13</sup> Hubungan patron-klien tersebut tidak saja terbatas pada eksploitasi tetapi sampai kepada tingkat ketergantungan yang tinggi. Ketergantungan yang dimulai dari satu aspek sosial umumnya berkembang menjadi ketergantungan yang luas dan mencakup beberapa aspek kehidupan sosial lainnya.

Konsep dari perspektif Marxian tersebut, hubungan patron-klien merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran khusus. Dua pihak yang terlibat dalam hubungan pertukaran mempunyai kepentingan yang hanya berlaku

---

<sup>10</sup>Sumeeta Shyamsunder Chandavarkar, *Patron-Client Ties and Maoist Rural China* (Thesis MA pada Departmen of Political Science, University of Toronto, 1997).

<sup>11</sup> Karenanya, patron-klien adalah hubungan pertukaran sosial antara dua orang atau lebih yang berkembang ke arah hubungan pertukaran yang tidak seimbang, di mana patron mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ketimbang klien. Kedudukan lebih tinggi (superior) ini disebabkan karena adanya kemampuan, status, dan kekuasaan lebih besar dari patron ketimbang klien.

<sup>12</sup> Mushtaq H. Khan, “Patron-Client Networks And The Economic Effects Of Corruption In Asia” *European Journal of Development Research*, Vol. 10 No. 1 (June 1998), h. 15-39.

<sup>13</sup> Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx* (Jakarta: Teplok Press, 1999), h. 58.

dalam konteks hubungan mereka. Dengan kata lain, kedua pihak memasuki hubungan patron-klien karena terdapat kepentingan (*interest*) yang bersifat khusus atau pribadi, bukan kepentingan yang bersifat umum.<sup>14</sup> Hubungan semacam itu dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memang dipandang perlu untuk mempunyai sekutu (*encon*) yang mempunyai status, kekayaan dan kekuatan lebih tinggi (*superior*) atau lebih rendah (*inferior*) daripada dirinya. Persekutuan antara patron dan klien merupakan hubungan saling tergantung. Dalam kaitan ini, aspek ketergantungan yang cukup menarik adalah sisi ketergantungan klien kepada patron.

Ketergantungan semacam ini karena adanya hutang budi klien kepada patron yang muncul selama hubungan pertukaran berlangsung. Patron sebagai pihak yang memiliki kemampuan lebih besar dalam menguasai sumber daya ekonomi dan politik cenderung lebih banyak menawarkan satuan barang dan jasa kepada klien, sementara klien sendiri tidak selamanya mampu membalas satuan barang dan jasa tersebut secara seimbang. Ketidakmampuan klien di atas memunculkan rasa hutang budi klien kepada patron, yang pada gilirannya dapat melahirkan ketergantungan. Hubungan ketergantungan yang terjadi dalam salah satu aspek kehidupan sosial pada gilirannya dapat meluas ke aspek-aspek kehidupan sosial lainnya.

Kaitannya dengan komunitas petani di desa, Scott<sup>15</sup> dan Popkin<sup>16</sup>, secara berbeda melihat hubungan patron klien. Bagi Scott, hubungan patron-klien bagi petani merupakan satu sistem jaminan kelangsungan hidup. Walaupun hubungan itu merupakan bentuk eksploitasi bagi petani, tetapi sangat diperlukan. Dalam hukum etika subsistensi, bagi petani di manapun hubungan patron-klien bagaikan penyambung ketika menjelang musim panen tiba. Persepsi Scott, tentu sangat

---

<sup>14</sup> Carl H. Lande, "Group Politics and Diadic Politics: Notes for a Theory", dalam *Friends, Followers, and Factions*, h. 508. Walaupun demikian, terdapat beberapa kasus di mana patron dan klien sama mengejar kepentingan umum, tetapi ini terjadi ketika pencapaian tujuan patron merupakan prasyarat bagi pencapaian tujuan klien.

<sup>15</sup> James C. Scott, "Patron-Client Politics and political Change in Southeast Asia", *American Political Science Review*, No. 66 (1972). Lihat juga Idem, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven: Yale University Press, 1983).

<sup>16</sup> Samuel L. Popkin, *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam* (Illinois: FF. Peacock Publishers Inc., 1979).

berbeda dengan Popkin yang mencoba memahami petani melalui pendekatan ekonomi-politik dengan tidak membedakan sistem ekonomi petani dengan ekonomi pasar.

Patron politik tidak hanya melalui hubungan formal, tetapi juga melalui hubungan informal yang muncul karena ekonomi, keturunan, adat, agama ataupun pendidikan. Masyarakat di pedesaan bagi Scott yaitu menyalurkan aspirasi politiknya kepada patronnya untuk memperjuangkan kepentingan politiknya. Melalui patron tersebutlah petani ikut serta mengambil keputusan politik. Patron politik pula tidak mungkin mengabaikan kepentingan masyarakat karena hal ini menyangkut status kepentingan yang juga melekat kepada masyarakat. Status kepemimpinan informal akan hilang apabila keberpihakannya kepada masyarakat berkurang. Analisis hubungan patron-klien dalam politik lebih mudah menggunakan model Scott dengan mengubah unit analisis dari hubungan ekonomi ke hubungan politik. Scott menganalisis bahwa hubungan patron-klien tidak dilihat merugikan petani, karena jaminan kebutuhan yang dapat dipenuhi dari patron dan patron memerlukannya untuk reproduksi dari hubungan yaitu berupa kekuasaan dan reputasi sosialnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Legg juga mengemukakan perbedaan (*inequality*), terutama *power inequality* (perbedaan kekuasaan), yang merupakan ciri utama dari *patron-client relationship*. Hal ini menurutnya merupakan konsekwensi dari adanya perbedaan status itu, kekayaan, dan pengaruh. Tanpa adanya *inequality*, hubungan dua orang/pihak itu akan lebih bersifat persahabatan, sehingga bukan merupakan hubungan patron-klien.<sup>17</sup> Lebih lanjut Legg menambahkan bahwa ada 3 (tiga) syarat terbentuknya ikatan Patron-Klien yaitu :

- a. Para sekutu (*partners*) menguasai sumber-sumber yang tidak dapat diperbandingkan;
- b. Hubungan tersebut terjalin secara pribadi dan bersifat personal;
- c. Keputusan untuk mengadakan pertukaran didasarkan pada pengertian saling menguntungkan dan timbal balik (*mutual benefit and reciprocity*)

---

<sup>17</sup> Keith Legg, "Political Clientilism and Development", *Comparative Politics*, Vol. 4 No. 1 (Januari 1975), h. 152.

Hubungan ketergantungan klien kepada patron secara empiris dapat terlihat dalam kehidupan buruh tani, karyawan suatu usaha dan juragan ataupun elite lokal di suatu wilayah tertentu. Buruh tani atau karyawan sebagai pihak yang mempunyai kedudukan lebih rendah (*inferior*), sehingga mau tidak mau harus terus bergantung kepada elite tersebut dalam rangka melakukan kegiatan kerjanya. Dalam usaha mengatasi keterbatasan menguasai sumber daya seperti modal atau biaya produksi, alat-alat produksi dan akses pasar yang banyak diantaranya menempuh dengan menjalin hubungan kerja dengan juragan atau elite.

Hubungan yang tidak setara dijalin dalam hubungan patron-klien yang dilakukan buruh dapat ditelusuri dengan melihat keterikatan kepada juragan dalam memperoleh sumber daya, serta adanya pengorbanan waktu, tenaga untuk keperluan sosial atau politik kekuasaan elite lokal atau juragan. James Scott<sup>18</sup> dalam analisisnya lebih dalam mengatakan bahwa arus patron ke klien pada umumnya terjadi melalui pengharapan ketika jaminan krisis mendera klien sehingga sangat dibutuhkan patron sebagai pemberi jaminan pada saat bencana ekonomi, membantu menghadapi keadaan sakit atau kecelakaan, atau membantu pada waktu panen kecil atau saat panen gagal. Jadi, patron sering menjamin “dasar” subsistensi bagi kliennya dengan menyerap kerugian-kerugian (dalam pertanian atau pendapatan) yang akan merusak kehidupan klien jika tidak dilakukan oleh patron. Scott lebih lanjut<sup>19</sup> menggambarkan jasa patron secara kolektif dengan melihat sisi yang didapat oleh klien dari dalam dimana fungsi ekonomi itu digerakkan.

Pada masyarakat kelas tani dan kelas bawahnya menurut analisis Scott tidak diharapkan dan tidak mengharapkan menjadi bagian dari publik yang relevan secara politis, harapan yang tidak tertulis yang melestarikan batas-batas ini adalah bahwa ada jaminan subsistensi dan perlindungan minimum bagi kelas bawah yang tidak berperan serta oleh kelas elit yang politis. Pendapat Scott ini melihat bahwa patron sebagai pemberi jaminan dan perlindungan bagi klien dalam hal ini masyarakat tani tidak mampu menempatkan diri pada posisi yang memiliki

---

<sup>18</sup>James Scott. *Perlawanan Kaum Tani*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), h. 9

<sup>19</sup>James Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, h. 10.

nilai pada aspek publik. Dengan demikian Scott menyimpulkan bahwa pusat sistem pertukaran patron klien adalah pertukaran kepatuhan dan persetujuan oleh klien sebagai imbalan bagi pemberian hak sosial minimum oleh patron. Jika jaminan-jaminan ini terputus maka struktur perkecualian kehilangan unsur kunci dari legitimasinya.<sup>20</sup>

Posisi tawar menawar relatif dari kedua belah pihak pada hubungan patron klien, dalam pemikiran Scott ini, neraca pertukaran menentukan sejauh mana ukuran pertukaran yang berlaku, yang berarti bahwa hal ini mempertanyakan sejauh mana klien lebih membutuhkan si patron dibandingkan patron membutuhkan klien. Patron bagi Scott berada pada posisi yang lebih unggul jika ia mengendalikan barang dan jasa vital.

Penegasan Scott mengenai gagasannya pada peningkatan ketergantungan terhadap patronasi juga disebabkan atas penguasaan terhadap tanah dan kebutuhan akan aksesnya. Gagasannya melihat dari dampak kekuatan pasar di suatu wilayah memicu pertumbuhan kelompok strata tuan tanah elit yang baru dimana kekuasaan mereka terletak pada kepemilikan atas sumber kehidupan.

### **Metode Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kota Palopo tepatnya di kecamatan Wara Utara, lokasi ini dipilih tersebut dengan pertimbangan bahwa kecamatan Wara Utara merupakan daerah pesisir dengan jumlah penduduk yang besar, dan juga merupakan daerah pemilihan 1 Kota Palopo dimana elite lokal pesisir tersebut memiliki pengaruh. Pemilu legislatif lalu terdapat 10 calon legislatif *incumbent* dan 97 calon legislatif baru yang memperebutkan 9 kursi dari berbagai partai peserta Pemilu.

Dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan tipe penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan wawancara tidak terstruktur dengan para informan. Data pendukung diperoleh dari dokumen-dokumen yang dianggap

---

<sup>20</sup>James Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, h. 14.

relevan dengan penelitian seperti laporan penelitian, artikel berita di Koran maupun majalah, serta data dari pemerintah setempat.<sup>21</sup>

## **Pembahasan**

### **Bentuk Hubungan Elite Lokal Pesisir dan Petani Rumput Laut**

Elite lokal pesisir menciptakan ruang kekuasaan dengan memperhatikan kapasitasnya dalam memberikan pengaruh, nilai tawar dan tindakan. Elite ini di ruang sosialnya diartikan sebagai orang yang menempati kedudukan dalam suatu masyarakat dan dianggap sebagai individu yang kohesif dalam artian lain bahwa elite ini adalah individu yang memegang peranan penting dalam lingkungan sosialnya yang saling tarik menarik dan melekat dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam pembahasan ini kelompok elite lokal yang memiliki pengaruh yang cukup besar pada pemilihan calon legislatif DPRD Kota Palopo berasal dari golongan pengusaha rumput laut, dimana elite ini merupakan elite informal.

Sesuai dengan kategori elite Pareto dan Mosca dengan makna yang sederhana didasarkan atas pengaruh yang dimiliki individu atau kelompok dimana mereka menempati posisi di dalam puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, seperti dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas.

Dalam penelitian ini, pola hubungan patron klien dipusatkan pada salah seorang elit yang memiliki jaringan usaha dan dukungan politik yang luas yaitu Opu Ishak Daeng Maroa dan Istrinya Hj Suryani. elite yang berada di wilayah pesisir kota Palopo ini, keberadaannya dalam konteks lokal cukup kuat, ditinjau dari sisi pengaruh dan latar belakang kepemilikan aset ekonomi dan dominasi sumber daya. Dimana elite tersebut adalah pemilik tambak dan gudang pengeringan dan pengemasan rumput laut siap ekspor dengan jumlah petani penggarap dan buruh gudang yang terbesar di wilayah kecamatan Wara Utara. Hubungan elite lokal yang mendominasi akses sumber daya, permodalan, dan ketersediaan jasa pemasaran terhadap kelompok masyarakat pesisir dapat dipahami melalui penelusuran lebih jauh mengenai eksistensi dan aktifitas dari elite lokal ini.

---

<sup>21</sup>Moleong Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004)

Gambaran mengenai keberadaan elite ini semakin diperjelas dengan penuturan dari masyarakat. Dalam ruang sosial pengaruh seorang elite memegang peranan yang sangat penting sehingga kemampuan seseorang dalam menempatkan diri sebagai seseorang dengan jangkauan pengaruh yang besar diperlukan berbagai pemilikan sumber daya ekonomi, teknis, tenaga kerja dan sebagainya atau dengan terminologi khususnya merupakan kekuasaan yang ditopang oleh *asset utilitarian*.<sup>22</sup>

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, Hj. Suryani terpilih untuk menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD Kota Palopo dengan jumlah suara yang sangat signifikan. Dalam menjaring dukungan politik, Opu Ishak Daeng Maroa dan Istrinya Hj Suryani melakukan berbagai macam pendekatan. Pendekatan ini dilakukan untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan pemahaman kepada para petani rumput laut ataupun massa di lingkungannya bahwa dirinya merupakan representasi nyata dari massa pemilih untuk memperjuangkan nasib mereka ke arah yang lebih baik, selain itu elite ini meyakinkan bahwa dukungan politik kepada dirinya tidak akan sia-sia sebab yang tahu permasalahan dan kondisi di lingkungan ini dengan baik adalah dirinya, itulah sebabnya ia mendapatkan respon positif untuk mencalonkan diri dengan asumsi masyarakat pesisir bahwa elite ini akan memperjuangkan nasib serta kesejahteraan orang di lingkungan itu. Pendekatan yang dilakukan ini sebagai modal awal dalam menunjukkan keseriusan elitelokal dalam memasuki kontestasi politik yang lebih besar. Hal ini seperti yang di utarakan oleh Opu Ishak Dg Maroa.

Opu Ishak Dg Maroa menjelaskan bahwa relasi yang terbangun antara masyarakat pesisir dan dirinya di daerah Penggoli ini tidak terjadi hanya untuk proses pemilihan legislatif saja namun relasi berawal dari relasi bisnis yang terbangun sudah ada sejak lama yang dibuktikan dengan adanya gudang rumput laut yang dibangun jauh sebelum pencalonan sang pemilik gudang tersebut. Dengan begitu pemahaman yang ditangkap oleh penulis adalah relasi politik yang dibangun oleh elite lokal ini didasari oleh pengaruhnya di persoalan

---

<sup>22</sup> Lihat Etzoni dalam Poloma "Tipe Kekuasaan Sosial" tahun 2000, h. 364.

pertukaran nilai ekonomi, ketersediaan lapangan kerja dan atas reputasi yang sudah lama dibangun. Elite pesisir ini menggunakan pendekatan kekeluargaan atau dengan kata lain ia memanfaatkan sosok ketokohnya untuk mendapatkan keuntungan politik di pertarungan legislatif. Struktur kekuasaan yang dimiliki dalam pengamatan penulis pada saat turun langsung dilokasi penelitian memang berada pada kondisi yang mumpuni untuk menduduki jabatan politik, sebab dukungan yang mengalir kepada dirinya dari masyarakat pesisir sangat besar, reputasi dan pengaruh individunya begitu besar yang ia dapat dari kegiatan sosial yang ia lakukan dan selalu mendapat respon yang baik dilingkungannya.

Keinginan masyarakat dilingkungan pesisir untuk mendukung elit mereka dalam kontestasi politik muncul sebagai reaksi dari pengaruh yang sudah relatif lama dimiliki oleh Ishak Dg Maroa sebagai pemilik dari aset ekonomi bersama istrinya Hj. Hasriani. relasi politik yang dibangun oleh Opu Ishak Dg Marowabersama istrinya dengan masyarakat pesisir adalah relasi dengan sudut pandang struktur atau posisi dimana relasi politiknya ditunjang oleh reputasi dan kepemilikan aset sumberdaya pesisir yang dimiliki. Struktur atau posisi semakin dipertegas oleh hubungan sosial yang telah lama terjadi antara Opu Ishak Dg Maroa bersama Istrinya, Hj Hasriani dengan petani rumput laut. Relasi politik ini juga semakin mudah baginya sebab pengaruhnya di masyarakat pesisir dan tidak dibangun pada saat di pileg saja tetapi telah dimulai sejak lama.

Hj Hasriani, istri dari Opu Ishak Dg Maroa, yang terpilih sebagai legislator kota Palopo menuturkan bahwa basis massanya memang berada di wilayah pesisir dimana lokasi pergudangannya berada. Basis massa terbesar adalah karyawan ataupun petani yang memang sudah lama bekerja digudang miliknya telah mengenalnya. Suara yang diperoleh dari petani dan karyawan yang bekerja padanyasekitar 55% dari total perolehan suaranya

Penjelasan yang diberikan oleh Hj Hasriani ini menguatkan argumentasi yang menyatakan bahwa posisi relasi politik berada pada ruang kekuasaan tertentu dan menekankan pada persoalan kebutuhan seorang elite untuk terus berkembang. Tiap interaksi yang terjadi antara individu maupun kelompok sosial melahirkan suatu hubungan yang saling membutuhkan atas berbagai kepentingan yang

berbeda-beda. Sebagaimana Max Weber<sup>23</sup> menjelaskan lebih jauh bahwa hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang kerap kali menunjukkan hubungan yang tidak setara (*asymetric relationship*), dijelaskan juga bahwa dalam sebuah kekuasaan terdapat unsur “pemimpin“ (*direction*) “perintah atau kendali“ (*imperative control*). Dalam hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan yang lebih variatif dan kompleks.

Masyarakat pesisir laut yang telah lama bekerja sebagai petani rumput laut dan karyawan gudangnyamenjadikan elite lokal pesisir tersebut memiliki ruang kekuasaan yang cukup besar untuk mengaktualisasikan hubungan-hubungan sosial ke dalam bentuk relasi politik. Terlebih lagi penghargaan yang diberikan oleh masyarakat peisir dan petani rumput laut kepadaketokohan elitelokalini semakin memudahkannya menjalin relasi sebagaimana kondisi sosial budaya lokal pesisir yang relatif massif, responsif dan militan,dan hal ini juga secara praktistelah melahirkan elite politik baru di Kota Palopo.

Lebih dari itu, aspek proses sosial dan politik lokal seorang elite tidak dapat dipandang hanya dari sisi kepemilikan ekonomi semata. Selama ruang dan waktu memungkinkan bagi individu untuk mengembangkan kapasitas dan memperluas pengaruhnya, maka pada wilayah itulah kita akan menemukan peranan rasionalitasindividu bermain. Sebab disamping ia sebagai pelaku ekonomi secara individu, mereka juga makhluk sosial yang memiliki motivasi dan kepentingan-kepentingannya tersendiri untuk menduduki kekuasaan. Karena itu, sifat alamiah yang demikian dapat dikatakan sebagai pendorong kemunculan kelompok elite. Kalangan masyarakat pesisir Penggoli justru memandang tidak lazim jika seorang elite lokal pesisir menghabiskan waktunya untuk menunaikan tugas dan hanya terus menerus mengejar keuntungan ekonominya. Mereka itu pelaku dari usaha rumput laut yang berada di tengah masyarakat dantidak terisolir dari kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Jaminan pendapatan, ketersediaan modal dan alat produksi yang tentu saja dibuat oleh elite lokal ini merupakan bentuk kesanggupannya untuk terus menerus

---

<sup>23</sup> Soekanto. *Loc.cit*, h. 268 dan Poelinggomang, 2004, h.138.

secara konstan memberikan pengaruhnya kepada massa pemilih. Konsekuensi rasional yang lahir dari hubungan patron klien antara elite sebagai pemilik gudang pengeringan dan dan pengepakan komoditi rumput laut yang memiliki sejumlah orang-orang (klien) yang telah lama bekerja dengannya sebagai karyawan dan para petani rumput laut sebagai basis eksistensi usahanya sehingga dirasa banyak memberikan manfaat dalam hal pembiayaan, ketersediaan jasa pemasaran dan perlindungan jaminan pendapatan.

Selain dari proses kerja yang dilakukan di lokasi pergudangan elite pesisir ini juga menjalin interaksi kepada para petani rumput laut dan para pengepul sebagai penyuplai sehingga tentunya bukan hanya karyawan gudangnya saja sebagai klien dari elite ini dalam membangun hubungan patron-klien. Relasi ekonomi dan kesepakatan harga dari elite kepada para petani dan pengepul dipastikan selalu berjalan sehingga ketersediaan rumput laut yang telah dipanen dan hal ini dibantu oleh kepala gudang yang ditunjuk oleh elite.

Gambaran mengenai proses produksi dan pergudangan rumput laut ini menciptakan pola kerja dimana sang pemilik gudang adalah patron dari karyawan yang bekerja kepadanya dan petani rumput laut sebagai penyuplai. Hubungan patron klien ini dicirikan bahwa patron yang berkuasa dan kaya memberikan jaringan kerja dan penghidupan, perlindungan, keuntungan serta berbagai manfaat lainnya kepada kliennya. Dalam perkembangannya, hubungan tersebut dijalankan dengan jaminan dari patronnya bahwa patron menjamin kebutuhan ekonomi klien dan sebagai imbalannya klien memberikan berbagai bentuk loyalitas, kesanggupan dan juga terlebih kepada dukungan politik kepada patron. Dengan penjelasan tersebut hubungan ini saling menguntungkan (*mutual benefit and reciprocity*) meskipun dalam beberapa kondisi lebih menguntungkan patron sebagai pemilik modal dan sumber daya yang dibutuhkan.

Interaksi yang terjadi antara elite lokal sebagai pemilik gudang ini kepada para karyawannya dan para petani rumput laut merupakan hubungan ekonomi dalam bentuk pertukaran sumber daya. Seiring waktu interaksi tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus menimbulkan kesetiaan para pengikutnya yakni karyawan dan para petani rumput laut. Interaksi ekonomi dan

pertukaran sumberdaya ini kemudian diartikulasikan ke dalam sebuah relasi politik oleh elite pemilik gudang ketika dirinya mencalonkan diri di Pileg 2014 Kota Palopo. Dengan demikian elite ini mengarahkan hubungan patron klien yang ia bangun masuk ke dalam panggung rivalitas politik yang tentunya paralel dengan kebutuhan dan kepentingan politiknya itu sendiri.

### **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hubungan**

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian, maka faktor-faktor yang mempengaruhi relasi politik elite lokal pesisir dan petani rumput laut sebagai berikut;

#### **1. Perhitungan Keuntungan**

Salah satu hal yang paling mempengaruhi keberlangsungan hubungan patron-klien di wilayah pesisir Kota Palopo ini adalah adanya keuntungan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Patron mendapatkan keuntungan dari kesetiaan para pekerja untuk bekerja pada dirinya dan juga para petani dan pengepul untuk menyetorkan hasil pertaniannya kepada Patron. Disisi lain, patron juga mendapat keuntungan lain dari hubungan tersebut dengan mendapatkan loyalitas dari para karyawan, petani dan pengepul rumput laut yang berada pada jaringan bisnisnya. Petani rumput laut dan para karyawan gudang rumput laut mendapatkan keuntungan dari relasi tersebut dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi mereka dan adanya kepastian dan jaminan ekonomi yang diberikan oleh patron.

#### **2. Dominasi Sumber daya**

Masyarakat petani rumput laut sebagai massa pemegang suara di pesisir palopo yang relatif besar, telah dimanfaatkan oleh elite dengan menggunakan hubungan patron klien yang telah lama ia bangun dari usaha yang ia lakukan di sektor perikanan dan kelautan yakni kepemilikan gudang pengeringan dan pengepakan rumput laut. Hubungan patron klien ini dimanfaatkan oleh elite yang berpengaruh sebagai bentuk ketergantungan yang ditimbulkan dari hubungan ekonomi yang dilakukan oleh elite. Kondisi ini merujuk pada sebuah bentuk penganturan nilai sosial yang dicirikan oleh hubungan patron-klien, di mana patron yang berkuasa dan kaya memberikan pekerjaan, perlindungan, infrastruktur, dan berbagai

manfaat lainnya kepada klien yang tidak berdaya dan miskin.<sup>24</sup> Imbalannya, klien memberikan berbagai bentuk kesetiaan, pelayanan, dan bahkan dukungan politik kepada patron. Selain itu, konsep itu juga memunculkan kesadaran akan ketidaksamaan akses pada barang dan sumber. Hubungan khusus di sini dicirikan oleh suatu hubungan yang lebih bersifat personal dan vertikal, yakni hubungan hubungan pribadi yang bersifat superior-inferior.<sup>25</sup>

### 3. Ketergantungan Jasa Pemasaran dan Jaminan Pendapatan

Dalam wawancara yang dilakukan, motivasi sebagian besar masyarakat pesisir untuk memilih Hj. Hasriani pada Pemilihan Legislatif 2014 disebabkan adanya peningkatan ekonomi yang dialami masyarakat semenjak hadirnya Gudang rumput laut di daerah mereka sehingga hal ini titik awal lahirnya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap jasa pemasaran dari hasil panen rumput lautnya. Menurut beberapa masyarakat yang sempat penulis wawancarai bahwa Hj. Hasriani bersama suaminya, Opu Ishak Dg Maroa telah lama membangun gudang di lingkungan masyarakat pesisir dan ada beberapa masyarakat pesisir sudah menganggap Hj. Hasriani sebagai keluarga mereka sendiri. Hj. Hasriani sudah memberikan mereka keuntungan berupa jaminan pendapatan sebelum Hj. Hasriani duduk sebagai anggota dewan kota Palopo dan itu merupakan bagian dari ketergantungan jasa pemasaran dan jaminan pendapatan masyarakat pesisir penggoli.

Hubungan yang tidak setara dijalin dalam hubungan patron-klien yang dilakukan buruh dapat ditelusuri dengan melihat keterikatan kepada juragan dalam memperoleh sumber daya, serta adanya pengorbanan waktu, tenaga untuk keperluan sosial atau politik kekuasaan elite lokal atau juragan. James Scott<sup>26</sup> dalam analisisnya lebih dalam mengatakan bahwa arus patron ke klien pada umumnya terjadi melalui pengharapan ketika jaminan krisis mendera klien

---

<sup>24</sup>Karenanya, patron-klien adalah hubungan pertukaran sosial antara dua orang atau lebih yang berkembang ke arah hubungan pertukaran yang tidak seimbang, di mana patron mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ketimbang klien. Kedudukan lebih tinggi (superior) ini disebabkan karena adanya kemampuan, status, dan kekuasaan lebih besar dari patron ketimbang klien.

<sup>25</sup>Mushtaq H. Khan, "Patron-Client Networks And The Economic Effects Of Corruption In Asia" European Journal of Development Research, Vol. 10 No. 1 (June 1998),h. 39.

<sup>26</sup>James Scott. *Perlawanan Kaum Tani*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), h. 9.

sehingga sangat dibutuhkan patron sebagai pemberi jaminan pada saat bencana ekonomi, membantu menghadapi keadaan sakit atau kecelakaan, atau membantu pada waktu panen kecil atau saat panen gagal. Jadi, patron sering menjamin “dasar” subsistensi bagi kliennya dengan menyerap kerugian-kerugian (dalam pertanian atau pendapatan) yang akan merusak kehidupan klien jika tidak dilakukan oleh patron. Scott lebih lanjut<sup>27</sup> menggambarkan jasa patron secara kolektif dengan melihat sisi yang didapat oleh klien dari dalam dimana fungsi ekonomi itu digerakkan. Mereka patron ini kata Scott mengelola dan mensubsidi sumbangan dan keringanan, menyumbangkan tanah untuk kegunaan kolektif, mendukung sarana umum setempat (seperti sekolah, jalan kecil, bangunan masyarakat), menjadi tuan rumah bagi pejabat yang berkunjung, dan mensponsori festival, serta perayaan desa.

Hubungan ketergantungan dan legitimasi yang didapatkan patron dari klien berada pada dua pertanyaan penting. Pertanyaan tersebut bagi Scott menjadi penting sebab persoalan kepatuhan berbeda dalam model analitik yaitu terdapat kepatuhan yang rela dan ada kepatuhan yang tidak rela dalam sistem patron klien, apakah hubungan ketergantungan dilihat oleh klien sebagai hubungan yang bersifat kolaboratif dan sah atau terutama eksploitatif. Dalam bukunya Scott menjawab bahwa kunci dari evaluasi bagi klien ialah perbandingan antara jasa yang diterimanya dengan yang diberikannya. Makin besar nilai yang diterimanya dari patron dibanding biaya yang harus ia kembalikan, maka makin besar kemungkinannya ia melihat ikatan ini sebagai sah.<sup>28</sup>

Pada masyarakat kelas atas dan kelas bawahnya menurut analisis Scott tidak diharapkan dan tidak mengharapkan menjadi bagian dari publik yang relevan secara politis, harapan yang tidak tertulis yang melestarikan batas-batas ini adalah bahwa ada jaminan subsistensi dan perlindungan minimum bagi kelas bawah yang tidak berperan serta oleh kelas elit yang politis. Pendapat Scott ini melihat bahwa patron sebagai pemberi jaminan dan perlindungan bagi klien dalam hal ini masyarakat tani tidak mampu menempatkan diri pada posisi yang memiliki

---

<sup>27</sup>James Scott. *Perlawanan Kaum Tani*, h. 10.

<sup>28</sup>James Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, h. 11.

nilai pada aspek publik. Dengan demikian Scott menyimpulkan bahwa pusat sistem pertukaran patron klien adalah pertukaran kepatuhan dan persetujuan oleh klien sebagai imbalan bagi pemberian hak sosial minimum oleh patron. Jika jaminan-jaminan ini terputus maka struktur perkecualian kehilangan unsur kunci dari legitimasinya.<sup>29</sup>

Posisi tawar menawar relatif dari kedua belah pihak pada hubungan patron klien, dalam pemikiran Scott ini, neraca pertukaran menentukan sejauh mana ukuran pertukaran yang berlaku, yang berarti bahwa hal ini mempertanyakan sejauh mana klien lebih membutuhkan si patron dibandingkan patron membutuhkan klien. Patron bagi Scott berada pada posisi yang lebih unggul jika ia mengendalikan barang dan jasa vital.

Penegasan Scott mengenai gagasannya pada peningkatan ketergantungan terhadap patronasi juga disebabkan atas penguasaan terhadap tanah dan kebutuhan akan aksesnya. Gagasannya melihat dari dampak kekuatan pasar di suatu wilayah memicu pertumbuhan kelompok strata tuan tanah elit yang baru dimana kekuasaan mereka terletak pada kepemilikan atas sumber kehidupan.

### **Kesimpulan**

Kehadiran seorang atau kelompok yang berpengaruh kepada massa di suatu wilayah tertentu memberikan ruang hadirnya simpul kekuasaan dan relasi politik. Proses dari relasi politik tidaklah sederhana dan hanya dapat dilihat pada hasilnya saja. Seluruh aspek relasional itu dikalkulasi oleh seorang elite yang ia bangun dengan secara perlahan dan sangat lama. Diantaranya adalah interaksi sosial ke berbagai lapisan masyarakat, tindakan untuk melahirkan dan menjaga reputasi yang ia miliki, selain itu ia juga harus dapat memahami karakteristik lingkungan dimana ia dapat menancapkan pengaruhnya.

Relasi politik yang terbentuk berawal dari kedudukan individu atau elite yang memiliki akses terhadap sumber daya dan modal yang besar yang telah lama dikuasai dan kemudian hubungan sosial ini berlanjut menjadi suatu hubungan patron klien antara elite sebagai patron dan petani rumput laut sebagai klien yang dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan politik berupa suara pada kontestasi

---

<sup>29</sup>James Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, h. 14.

pemilihan anggota dewan pada 2014. Dalam relasi relasi politik itu elit mendapatkan keuntungan berupa dukungan politik oleh massa di pemilihan legislatif, dimana terdapat bentuk relasi politik yang dipengaruhi oleh perhitungan keuntungan elite, dominasi sumber daya, ketergantungan jasa pemasaran, dan jaminan pendapatan oleh petani rumput laut dan karyawan gudang. Hubungan patron klien yang ini telah lama tertanam dan menjadi karakteristik di wilayah pesisir. Ketergantungan ini berupa pertukaran jasa yang dimiliki oleh elite kepada massa, dimana jasa yang berupa penyediaan akses ekonomi, pemasaran hasil produksi rumput laut dan lapangan pekerjaan, kemudian hal ini menjadi sangat penting bagi kehidupan petani rumput laut. Dengan kata lain, elite lokal pesisir ini memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan sehingga terjadilah pertukaran yang bersifat timbal balik (*mutual benefit and reciprocity*). Selain itu fakta yang ditemukan dalam penelitan ini adalah, meskipun massa memiliki pilihan politik lain, namun sangat sulit untuk tidak memberi dukungan karena mereka tidak memiliki penyedia sumber daya yang lain, sehingga dalam penelitan ini relasi politik yang dilakukan antara elite lokal pesisir dengan masyarakat petani rumput laut dan karyawan gudangnya terjadi sebagai pengaruh dari faktor pilihan rasional elite dalam hubungan Patron Klien dan juga ditunjang oleh budaya paternalistik.

### Daftar Pustaka

- Brewer, Anthony. *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*. Jakarta: Teplok Press, 1999
- Chandavarkar, Sumeeta Shyamsunder. *Patron-Client Ties and Maoist Rural China*. Thesis MA pada Departmen of Political Science, University of Toronto, 1997
- Fukuyama, Francis. *Guncangan Besar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Idem. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press, 1983
- Khan, Mushtaq H. *Patron-Client Networks And The Economic Effects Of Corruption In Asia*. European Journal of Development Research, Vol. 10 No. 1 June 1998.
- Legg, Keith. *Political Clientilism and Development*. Comparative Politics, Vol. 4 No. 1, Januari 1975
- Lexy J., Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Popkin, Samuel L. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Illinois: FF. Peacock Publishers Inc., 1979
- Satria, Arif. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKIS, 2009.
- Scott, James. C. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Edisi Pertama, 1993.
- Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Politik; Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Cetakan III, 2014.

#### Sumber lain:

Kota Palopo dalam Angka 2014.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 145/M-IND/PER/12/2010 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota Palopo.

#### Internet:

bappenas.go.id libgen.org palopo.kota.bps.go.id palopokota.go.id kpu.go.id